

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang ke Sumatra menjadi penanda dimulainya suatu periode baru dalam sejarah kawasan tersebut. Masyarakat Sumatra yang sebelumnya telah memiliki tradisi dan kebudayaan sendiri, baik yang bersumber dari budaya lokal maupun pengaruh Hindu-Buddha, kemudian berhadapan dengan peradaban baru yang dibawa oleh Islam. Kehadiran Islam dengan demikian menandai pertemuan dua tradisi besar yang saling berinteraksi dan bernegosiasi. Melalui proses yang berlangsung secara bertahap, Islam mulai memengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat Sumatra.¹ Perkembangan tersebut tidak terjadi secara sepihak, melainkan melalui negosiasi antara para penguasa kerajaan, masyarakat, dan para ulama yang terjalin dalam jaringan perdagangan maritim.²

Seiring berjalannya waktu, Islam semakin berakar kuat di berbagai kerajaan Melayu di Sumatra maupun Semenanjung Melayu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra. Kesaksian para pelancong yang mengunjungi kawasan tersebut turut menunjukkan kuatnya pengaruh Islam. Ibnu Battutah, misalnya, ketika berkunjung ke Kesultanan Pasai pada 1345, menggambarkan Sultan Malik al-Zahir sebagai seorang penguasa yang saleh, rendah hati, dan memiliki perhatian besar terhadap agama, sementara rakyatnya dikenal memiliki semangat yang kuat dalam membela Islam.³ Selain Pasai, kemudian muncul Kesultanan Malaka sebagai kerajaan Islam-Melayu yang memiliki hubungan genealogis dengan Sumatra.⁴ Kemunculan kedua kesultanan tersebut menjadi salah satu penanda semakin menguatnya pengaruh Islam di

¹ Roeslan Abdulgani, "Islam Datang ke Nusantara Membawa Tamaddun/Kemajuan/Kecerdasan". Dalam A. Hasymy ed. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1993), hlm. 110-111.

² Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below The Winds* (London & New York: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 11.

³ Anthony Reid, *Sumatera Tempo Doeloe: Dari Marcopolo sampai Tan Malaka* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 14.

⁴ Leonard Y. Andaya, *Selat Malaka: Sejarah Perdagangan dan Etnisitas* (Depok: Komunitas Bambu, 2019), hlm. 69.

Sumatra dan Semenanjung Melayu, sekaligus memperlihatkan bahwa Islam mulai menjadi dasar penting dalam pembentukan identitas politik kerajaan-kerajaan Melayu.

Perkembangan Islam di Sumatra berlangsung seiring dengan semakin pesatnya jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan kawasan ini dengan berbagai komunitas Muslim di dunia. Penyebaran Islam berjalan melalui peran para saudagar dan ulama yang datang dari berbagai wilayah, sehingga menjadikan Sumatra sebagai bagian dari jaringan Islam lintas kawasan. Dinamika perdagangan tersebut, ditambah dengan masuknya kekuatan-kekuatan Barat yang kemudian menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Malaka, justru mendorong lahirnya pusat-pusat kekuasaan Islam yang baru di kawasan ini.⁵ Dalam konteks tersebut, Islam tidak hanya berkembang sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga semakin memengaruhi kebudayaan dan kehidupan masyarakat, yang tercermin dari menguatnya nilai-nilai dan corak keislaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik.⁶

Perkembangan tersebut mencapai bentuk yang berbeda pada abad ke-19, yang kerap dipandang sebagai masa kebangkitan Islam di Indonesia. Kebangkitan ini tidak dapat dilepaskan dari reaksi kalangan ulama dan masyarakat Muslim terhadap semakin kuatnya ekspansi kolonial Belanda dan Inggris. Anthony Reid menjelaskan bahwa tekanan kolonial mendorong banyak masyarakat Indonesia menjadikan Islam sebagai bentuk perlindungan sekaligus identitas kolektif, karena Islam berfungsi sebagai pembeda yang tegas antara masyarakat pribumi dengan orang-orang Eropa.⁷ Dalam konteks ini, pelaksanaan ibadah haji dan kegiatan menuntut ilmu di Mekkah dan Madinah membuka ruang bagi umat Islam, khususnya dari Sumatra, untuk membangun komunikasi dan jaringan dengan

⁵ HAMKA, *Sejarah Umat Islam* (Singapura: Pustaka Nasional, 2010), hlm. 683 & 699.

⁶ A. Daliman, *Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 60-95.

⁷ Anthony Reid, "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas Di Indonesia dan Malaysia," dalam Nico J. G. Kaptein (ed.), *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh* (Jakarta: INIS, 2003), hlm. 1, 3.

sesama Muslim dari berbagai wilayah yang juga mengalami tekanan kolonial.⁸ Pengalaman yang sama tersebut pada akhirnya memperkuat solidaritas Islam lintas wilayah, yang kemudian menemukan simbol pemersatunya pada Kesultanan Utsmani sebagai representasi otoritas politik dan pelindung dunia Islam pada masa itu.

Pada masa yang sama, ketika kesadaran persatuan Islam mulai tumbuh di berbagai wilayah Muslim, Kesultanan Utsmani justru tengah menghadapi tekanan yang semakin besar dari negara-negara Barat. Kemajuan pesat yang dicapai Eropa dalam bidang militer, ekonomi, dan politik membuat posisi Utsmani semakin terdesak dalam percaturan internasional.⁹ Di samping tekanan dari luar, pemerintah Utsmani juga dihadapkan pada berbagai gerakan pemberontakan di sejumlah wilayah kekuasaannya yang bertujuan melepaskan diri dari otoritas pusat dan membentuk negara yang merdeka. Sebagian besar gerakan tersebut memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan Barat yang melihatnya sebagai peluang strategis untuk melemahkan Kesultanan Utsmani, yang pada masa itu masih dipandang sebagai simbol kekuasaan dan persatuan dunia Islam.¹⁰

Menyadari besarnya tantangan yang dihadapi, pemerintah Utsmani berupaya melakukan berbagai pembenahan internal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Salah satu langkah terpenting yang ditempuh adalah pelaksanaan reformasi sosial-politik yang dikenal sebagai Tanzimat, sebuah program reformasi yang bertujuan memperkuat administrasi negara dan meningkatkan kemampuan Utsmani dalam menghadapi tekanan dari luar.¹¹ Meskipun pelaksanaannya kerap menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat maupun elite pemerintahan,¹² reformasi tersebut menunjukkan adanya upaya serius dari pihak Utsmani untuk mempertahankan

⁸ Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 309, 321.

⁹ Ratu Suntiha dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Rosda, 2019), hlm. 218.

¹⁰ Donald Quartet, *The Ottoman Empire, 1700–1922* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 55.

¹¹ Nicko Pandawa, *Dafatir Sulthaniyah: Menguk Loyalitas Muslimin Jawi Untuk Khilafah 'Utsmaniyah* (Bogor, Komunitas Literasi Islam, 2022), hlm. 20.

¹² Carter Vaughn Findley, *Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity: A History 1789-2007* (New Haven: Yale University Press, 2010), hlm. 132.

keberlangsungan negaranya. Di tengah berbagai persoalan tersebut, Kesultanan Utsmani tetap memiliki wibawa yang besar di mata banyak komunitas Muslim.¹³ Bagi banyak kerajaan dan penguasa Muslim di berbagai wilayah, termasuk di Nusantara, Utsmani masih dipandang sebagai representasi otoritas politik Islam yang paling berpengaruh. Karena itu, tidak mengherankan apabila pemerintah Utsmani kerap menerima penghormatan, permohonan perlindungan, maupun permohonan pengakuan dari berbagai kerajaan Islam yang berusaha menghubungkan diri mereka dengan pusat kekuasaan Islam tersebut.

Pada 1824, Belanda dan Inggris kembali mempertegas kerja sama mereka melalui sebuah perjanjian yang membagi wilayah pengaruh imperialisme masing-masing, dengan menempatkan Sumatra ke dalam lingkup kekuasaan Belanda.¹⁴ Perjanjian ini menjadi titik penting yang mendorong semakin luasnya ekspansi Belanda di Sumatra sepanjang abad ke-19. Dalam proses tersebut, Belanda terlibat dalam berbagai peperangan melawan kerajaan-kerajaan lokal, yang di sejumlah wilayah tidak hanya bermuatan politik, tetapi juga dibingkai oleh semangat keagamaan. Di banyak kawasan, Belanda pada dasarnya berhadapan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang telah lama menjadi otoritas politik sekaligus keagamaan bagi masyarakat setempat.¹⁵ Dengan demikian, ekspansi Belanda tidak hanya bertujuan memperluas penguasaan wilayah, tetapi juga mengganggu bahkan merombak tatanan politik dan keagamaan yang sebelumnya telah terbentuk di berbagai kerajaan Islam di Sumatra.

Salah satu kerajaan Islam yang menerima dampak langsung dari perjanjian tersebut adalah Kerajaan Riau-Lingga.¹⁶ Perjanjian Inggris–Belanda tahun 1824 memisahkan wilayah Riau-Lingga dari daerah-daerahnya di Semenanjung Melayu yang selama berabad-abad berada dalam satu kesatuan politik Kerajaan Johor–Riau. Pemisahan ini tidak hanya mengubah batas-batas kekuasaan, tetapi juga

¹³ Mehmet Maksudoğlu, *The Untold History of Ottoman: Menelusuri Daulah Islamiyah Terbesar di Dunia dan Pemerintahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 4.

¹⁴ Colin Brown, *A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation?* (Crows Nest: Allen & Unwin, 2003), hlm. 81.

¹⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 212-215.

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 276-277.

membelah dunia Melayu yang sebelumnya saling terhubung, sehingga, sebagaimana digambarkan dalam sumber-sumber sezaman, memisahkan sahabat dari sahabat dan saudara dari saudara.¹⁷ Sejak saat itu, wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam satu kerajaan mulai menempuh perjalanan sejarah yang berbeda, sementara Riau-Lingga semakin berada di bawah tekanan politik dan pengaruh kolonial Belanda.

Di tengah situasi tersebut, yang ditandai dengan semakin dalamnya keterlibatan Belanda dalam pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga, kerajaan ini tidak serta-merta mengalami kemunduran. Sebaliknya, periode ini justru melahirkan banyak ulama dan cendekiawan yang aktif mengembangkan tradisi intelektual sebagai respons terhadap perubahan politik dan sosial yang sedang berlangsung.¹⁸ Pulau Penyengat kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan Melayu sekaligus pusat pengajaran Islam yang berpengaruh di kawasan tersebut. Melalui kegiatan penulisan, pendidikan, dan dakwah, para ulama Riau-Lingga tidak hanya berupaya mempertahankan warisan intelektual Melayu-Islam, tetapi juga menjalin hubungan keilmuan dengan para guru dan pusat-pusat ilmu di luar negeri. Jaringan keilmuan tersebut pada akhirnya memperkuat identitas keislaman Riau-Lingga sekaligus menumbuhkan rasa keterhubungan dengan komunitas Muslim yang lebih luas.¹⁹

Perkembangan intelektual tersebut berjalan seiring dengan menguatnya identitas Islam sebagai respons terhadap imperialisme Barat. Fenomena yang sama juga tampak di berbagai wilayah Sumatra, ketika kebangkitan agama menjadi salah satu bentuk reaksi atas semakin luasnya ekspansi kolonial Belanda. Dalam konteks inilah hubungan dengan Kesultanan Utsmani, sebagai simbol otoritas politik dunia Islam, mulai memperoleh arti yang semakin penting.²⁰ Sejumlah kerajaan Islam di Nusantara berupaya menjalin hubungan dengan

¹⁷ Barbara Watson Andaya & Virginia Matheson, "Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu: Tulisan Raja Ali Haji dari Riau (1809-1870)", dalam Anthony Reid dan David Marr (ed). *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya* (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 99.

¹⁸ Helmiati, *Genealogi Intelektual Melayu Tradisi & Pemikiran Islam Abad k-19 di Kerajaan Riau Lingga* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 2.

¹⁹ Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 305-306

²⁰ İsmail Hakkı Kadı & A.C.S. Peacock, *Ottoman-Southeast Asian Relations: Sources from the Ottoman Archives* (Leiden: Brill, 2020), hlm. 75.

Utsmani untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, maupun legitimasi politik-keagamaan, dan Kerajaan Riau-Lingga menjadi salah satunya. Upaya tersebut mencapai bentuk yang paling nyata pada 1856, ketika Yang Dipertuan Muda Raja Ali Ja'far mengirimkan sepucuk surat resmi kepada Sultan Utsmani sebagai awal terjalinnya hubungan diplomatik antara Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani.

“Saya meminta dari kasih sayang dan kelembutan Daulah ‘Aliyah (Utsmani)—semoga Allah Menjadikannya abadi—agar saya berada di bawah naungannya (Utsmani)...dan agar saya menjadi salah satu rakyatnya dan di bawah perlindungannya...”²¹

Dokumen tersebut dapat dibaca sebagai penanda awal adanya hubungan antara Kesultanan Riau-Lingga di Sumatra dan Daulah Utsmani di Istanbul yang berlangsung di tengah menguatnya imperialisme Barat pada abad ke-19. Dalam konteks tersebut, Islam tampak menjadi salah satu kerangka rujukan yang memungkinkan terbentuknya keterhubungan antarkomunitas Muslim lintas wilayah, sekaligus menjadi saluran bagi para penguasa Muslim untuk membangun hubungan dengan otoritas Islam yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber yang tersedia, surat Raja Ali Ja'far dapat dipahami sebagai salah satu petunjuk awal yang mengisyaratkan adanya hubungan politik dan keagamaan antara Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani. Hubungan tersebut tampaknya tidak berhenti pada pengiriman surat tahun 1856, melainkan memiliki kemungkinan berlanjut hingga menjelang runtuhnya Kesultanan Riau-Lingga pada 1911.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul ***"Jejak Hubungan Diplomatik antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kerajaan Utsmani (1856–1858)"*** berupaya menelusuri bentuk dan makna hubungan yang terjalin antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa hubungan tersebut bukan sekadar bentuk komunikasi diplomatik antarkerajaan, melainkan juga merupakan upaya Kerajaan Riau-Lingga, yang berada di bawah tekanan kolonial Belanda, untuk menghubungkan diri dengan otoritas politik Islam yang lebih luas. Dengan demikian, hubungan tersebut dapat dipahami

²¹ Nicko Pandawa, *Dafatir Sulthaniyah: Menguak Loyalitas Muslimin Jawi Untuk Khilafah 'Utsmaniyah*, hlm. 109.

sebagai bagian dari usaha Riau-Lingga untuk terlibat dalam arus utama dunia Islam sekaligus mencari legitimasi politik-keagamaan di tengah semakin kuatnya dominasi kolonial Belanda.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka dibuatkan masalah penelitian berupa ditemukannya bentuk-bentuk hubungan yang terjadi antara Kerajaan Riau-Lingga dengan Turki-Utsmani. Untuk menjawab permasalahan tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks sejarah yang melatarbelakangi hubungan awal antara Dunia Melayu dan Kesultanan Utsmani?
2. Apa saja dan Bagaimana proses terjalinnya hubungan diplomatik antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis rencanakan mengenai bentuk-bentuk hubungan Kerajaan Riau-Lingga dengan Turki-Utsmani sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konteks sejarah yang melatarbelakangi hubungan awal antara Dunia Melayu dan Kesultanan Utsmani?
2. Untuk mengetahui proses terjalinnya hubungan diplomatik antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani?

D. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka dilakukan untuk menelusuri penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan. Hal ini dilakukan agar menghindari kesamaan penelitian, sekaligus memberikan informasi baru yang menjadi pelengkap penelitian sebelumnya. Adapun dalam tema yang diangkat oleh penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi panduan bagi penulis untuk mengarahkan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Alaeddin Tekin (2021) berjudul *Restoration of Riau Sultanate-Ottoman Relations (1857-1904): Explanatory Factors*.

Sependek yang penulis baca, artikel ini merupakan penelitian paling terbaru terkait hubungan Utsmani dengan dunia Melayu, terutama pada Kesultanan Riau-Lingga. Artikel ini mencoba menjelaskan faktor yang menjadi alasan dijalinnya hubungan antara Riau-Lingga dan Utsmani. Namun, penulis tidak cukup jelas atau lengkap dalam menjabarkan konteks peristiwa yang menyebabkan relasi pertama dibangun.

2. Buku yang ditulis oleh Nicko Pandawa (2021) berjudul *Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda: Riwat Pan-Islamisme dari Istanbul Sampai Batavia, 1882-1928*.

Buku ini, yang sebelumnya merupakan skripsi dari penelitian penulisnya, menjabarkan banyak bukti terkait relasi antara Khilafah Utsmani dan Indonesia. Tak luput juga terkait relasi Utsmani dengan kerajaan di Sumatra (Melayu). Beliau mengajarkan dengan sangat lengkap terkait sejarah Pan-Islamisme dari awal terbentuk hingga pengaruhnya di Hindia-Belanda (Indonesia). Sekaligus menyoroti perpindahan semangat islam-state perlahan berganti nasionalisme di Indonesia.

3. Skripsi S1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis oleh Ferdi Jakfar (2020) berjudul *Kerajaan Riau-Lingga Tahun 1824-1911*.

Skripsi ini menjelaskan sejarah Kerajaan Riau-Lingga sebagai etnisitas kerajaan yang terpecah dari Kerajaan Riau-Johor pada 1824. Sekaligus menyoroti perpindahan dan masa kejayaan Kesultanan Riau-Lingga. Secara garis besar, skripsi ini membantu mengkronologiskan kesultanan Riau-Lingga. Namun, dalam pembahasannya tidak sampai menyentuh hubungan luar negeri dengan Utsmani, yang mana merupakan kajian utama dalam skripsi penulis. Namun, skripsi ini tetap penting untuk menjadi pemandu dalam penelitian penulis.

4. Tiga tulisan yang dihimpun oleh Nico J. G. Kaptein (2003) yang dijadikan buku berjudul *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Pan-islamisme di*

Hindia-Belanda Timur Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh.

Tiga tulisan yang ada di dalam buku aslinya berbahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dalam buku tersebut. Tiga tulisan tersebut diantaranya: tulisan Anthony Reid berjudul “Pan-Islamisme di Indonesia dan Malaysia Abad kesembilan Belas”; tulisan Kees van Dijk berjudul “Ketakutan Penjajah, 1890-1918: Pan-islamisme dan Persekongkolan Jerman India”; tulisan Jan Schmidt berjudul “Pan-islamisme di antara Porte, Den Haag, dan Buitenzorg”. Ketiga tulisan ini banyak mengeksplorasi kekhawatiran Belanda terhadap pengaruh Pan-islamisme di Nusantara. Buku ini menjadi penting untuk memandu perkembangan ideologi Pan-islamisme di Nusantara, termasuk dunia Sumatra (Melayu).

5. Buku yang berisi banyak tulisan yang dikumpulkan oleh Andrew Peacock dan Annabel Teh Gallop (2015) berjudul *From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turk and Southeast Asia*.

Buku ini menyajikan banyak tulisan yang ditulis oleh kontributor yang interdisipliner. Mengkaji relasi Utsmani dengan Aceh dan Asia Tenggara lewat berbagai aspek. Secara garis besar, buku ini membahas hubungan politik, ekonomi, keagamaan, dan intelektual antara Asia Tenggara dan Kesultanan Utsmani sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Buku ini juga menyoroti kontak awal antara Aceh dan Utsmani dalam melawan Portugis, peran haji sebagai jalur interaksi, serta upaya kerajaan-kerajaan Melayu mencari dukungan Istanbul pada masa kolonial. Berdasarkan arsip baru dari Istanbul, buku ini menjadi studi komprehensif pertama tentang keterhubungan dunia Melayu-Islam dengan Utsmani dan pengaruh Turki modern di Asia Tenggara.

E. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan serangkaian prosedur atau teknik tertentu yang digunakan untuk mencari bahan-bahan sejarah lalu menjarang

informasi selengkap mungkin.²² Dalam artian, metode penelitian sejarah adalah langkah-langkah untuk mendapat dan mengumpulkan data sejarah lalu mengolahnya menjadi satu narasi sejarah. langkah-langkah penelitian sejarah diantaranya sebagai berikut:

1. Heuristik.

Pada tahap ini, dilakukan pencarian sumber-sumber yang memberikan data atau materi sejarah. Dalam pencarian, seseorang akan menelusuri arsip atau catatan yang dapat menunjang penelitian. Di penelitian ini penulis juga mencari dan menelusuri arsip yang mendukung penelitian terkait dinamika perjalan kerajaan Melayu terutama Kerajaan Riau-Lingga dan hubungan dunia Melayu dengan Kesultanan Utsmani. Penulis menelusuri sumber di beberapa tempat, diantaranya: Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan UIN Bandung, Perpustakaan Batoe Api Jatinangor, dan website penyedia buku e-book yang penulis butuhkan. Penulis menetapkan sumber merupakan berasal dari abad ke-19. Pegangan utama dalam penelitian ini adalah buku berjudul *Ottoman southeast Asian Relations: Source From The Ottoman Archive*, yang berisi kumpulan transkrip arsip yang dikumpulkan oleh İsmail Hakkı Kadı & A.C.S. Peacock. Mereka menelusuri arsip yang tersimpan di *Başkanlığı Osmanlı Arşivleri* (BOA) lalu dikumpulkan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik di Asia Tenggara. Begitu pula buku lainnya yang punya relevansi dengan penelitian ini.

- a. Sumber Primer

Sumber sejarah merupakan saksi mata atas peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Sehingga yang dimaksud dengan sumber primer adalah bukti yang sezaman dengan suatu peristiwa yang terjadi.²³ Dengan kata lain, sumber sejarah primer ialah saksi mata atau bukti sezaman dari terjadinya suatu peristiwa.

²² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 10-11.

²³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm. 61, 68.

Sumber Tertulis.

- Surat Raja 'Ali ibn al-Marhum Raja Muda Ja'far, Riau, 1259 H / 1843–1844 M, BOA Ī.DH. 368/24377 (1).
- Surat utusan Riau kepada Grand Vizier yang menjelaskan misinya, BOA Ī.DH. 368/24377 (2).
- Surat Wazir Agung kepada sultan untuk memberitahukan tentang utusan dari Riau, 17 Jumada al-Thani 1273 H / 12 Februari 1857 M, BOA Ī.DH. 368/24377 (5).
- Surat Wazir Agung kepada Sultan yang memberitahukan tentang respons Ottoman terhadap misi Riau serta persetujuan Sultan yang disampaikan melalui Sekretaris Agung, 21 June 1858 BOA Ī.DH. 407/26941
- Surat diploma kekaisaran yang menganugerahkan medali Mecidi tingkat ketiga kepada Raja Ali bin Ja'far dari Riau, 12 Juli 1858 BOA A.DVN.MHM. 25/97
- Catatan untuk departemen tanda tangan kekaisaran untuk menginformasikan bahwa medali Raja Ali bin Ja'far telah dikirim dari gudang, 9 July 1858 BOA A.DVN. 132/72
- *Hikayat Abdullah* karya Abdullah bin Abdulkadir Munsyi.
- *Tuhfat al-Nafis* karya Raja Ali Haji.
- Dokumen resmi yang diterbitkan ANRI: Surat-surat Perdjangjian antara Kesultanan Riau-Lingga dan Belanda.
- *De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 t . E. Netscher.*

Sumber visual.

- Foto makam Raja Ali Ja'far, koleksi pribadi.
- Foto makam Raja Ali Haji, koleksi pribadi.
- Foto masjid raya sultan Penyengat.
- Foto Istana Kantor Raja Ali Ja'far.

b. Sumber Sekunder.

- Ahmad Dahlan. *Sejarah Melayu*. (Jakarta: KPG, 2014).

- Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. *Sejarah Malaysia*. (Kuala Lumpur: Macmillan Publishers, 1983).
- Nicko Pandawa. *Khalifah dan Ketakutan Penjajah Belanda: Riwayat Pan-Islamisme dari Istanbul Sampai Batavia, 1882-1928*. (Bogor: Komunitas Literasi Islam, 2020).
- Nico J. G. Kaptein (ed). *Kekacauan dan Kerusuhan: tiga tulisan tentang Pan-islamisme di Hindia-Belanda Timur pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh*. (Jakarta: INIS, 2003).
- İsmail Hakkı Göksoy dan İsmail Hakkı Kadı (ed). *Studies the relations Between the Ottoman Empire and Southeast Asia*. (Ankara: YTB Publications, 2024).
- Vladimir Braginsky. *The Turkic-Turkish Theme in Traditional Malay Literature: Imagining the Other to Empower the Self*. (Leiden: Brill, 2015).
- Andrew Peacock and Annabel Teh Gallop. *From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turk and Southeast Asia*. (Oxford: Oxford University Press, 2015).
- Anthony Reid. *Menuju Sejarah Sumatra*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor; KITLV, 2011).
- Alaeddin Tekin. Restoration of Riau Sultanate-Ottoman Relations (1857-1904): Explanatory Factors. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought & Civilization*, 2021, 26.2.
- Meirison dkk. The Ottoman Empire Relations with the Nusantara (Spice Islands). *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 2020, 24.2: 140-147.

2. Kritik Sumber.

Setelah melakukan langkah heuristik, selanjutnya dilakukan kegiatan kritik sumber. Kritik sumber adalah kegiatan menyaring atau memfilter

sumber-sumber yang sudah ditemukan. Dilakukan pemeriksaan dan penyaringan informasi terhadap materi sumber, agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, sumber kritik menuntut proses kritis sekaligus skeptik untuk menghindari sumber palsu, demi menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil fantasi.²⁴

a. Kritik Eksternal.

Kritik eksternal merupakan kegiatan verifikasi atau pengujian pada aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Sederhananya, kritik ekstern bertujuan untuk menentukan apakah sumber memiliki otentisitas dan integritas.²⁵ Berikut kritik ekstern terhadap sumber yang penulis gunakan.

- Surat Raja ‘Ali ibn al-Marhum Raja Muda Ja‘far dari Riau, bertarikh 1856, tersimpan di arsip Kesultanan Utsmani, Istanbul, dengan kode arsip BOA İ.DH. 368/24377 (1). Surat ini ditulis oleh Raja Ali Ja‘far (1844–1855) ketika ia menjabat sebagai Raja Muda Riau-Lingga.

Dokumen ini berbahasa Arab dan ditulis dengan tulisan tangan (manuskrip) yang masih terbaca jelas. Di pojok kiri bawah terdapat cap resmi jabatan Raja Muda serta nama “Raja Ali Ja‘far”, yang berfungsi sebagai tanda otoritas resmi. Berdasarkan gaya tulisan, penggunaan bahasa, serta jenis cap yang sesuai dengan praktik administratif Melayu abad ke-19, surat ini dapat dianggap otentik dan berasal dari masa yang disebutkan.

- Surat utusan Riau kepada Wazir Agung yang menjelaskan misinya, kemungkinan ditulis pada tarikh 1857 dengan kode arsip BOA İ.DH. 368/24377 (2), tersimpan di Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Istanbul. Surat ini dikirim oleh Shaykh Ahmed Ahmad bin Uthmān al-Khālidī al-Naqshbandī al-

²⁴ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm. 83-84.

²⁵ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm. 84-85.

Sambāwī dan Sayyid Zayn bin Sayyid Hussayin Muhzirī al-Maghribi kepada Grand Vizier di Istanbul melalui rekomendasi Syeikh Ismail Efendi, Residen Mekkah. Dokumen ditulis di atas kertas dengan tulisan tangan Arab, berbahasa Arab, dan masih utuh. Meskipun tidak mencantumkan tanggal maupun tempat penulisan, konteksnya menunjukkan bahwa surat ini kemungkinan besar dibuat di Mekkah.

Pada bagian bawah surat terdapat cap resmi kedua utusan Riau, menandakan keaslian dan otoritas pengirimnya. Berdasarkan bentuk tulisan, gaya bahasa, dan penggunaan cap, dokumen ini sesuai dengan praktik administrasi abad ke-19 dan dapat dinilai otentik. Penelitian ini menggunakan foto digital arsip serta terjemahan resmi dalam bahasa Turki dan Inggris yang telah ditranskripsi oleh sejarawan lain. Karena transkripsi tersebut bersumber langsung dari arsip BOA, maka keaslian sumber dapat dipertanggungjawabkan.

- Kritik sumber visual makam Raja Ali Ja'far. Foto makam Raja Ali bin Raja Ja'far saya ambil sendiri pada 18 Februari 2026 ketika saya berkunjung ke Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Foto tersebut saya ambil secara langsung menggunakan HP pribadi dan merupakan hasil dokumentasi asli dari perangkat saya. Saya masih menyimpan file asli foto tersebut di HP dalam folder khusus, sehingga asal-usul dan keberadaan sumber visual ini dapat diketahui dengan jelas.

Foto tersebut tidak mengalami pengeditan, pemotongan, pemberian filter, maupun perubahan lainnya, sehingga masih dalam kondisi seperti saat pertama kali saya mengambilnya. Saya juga tidak melakukan perubahan terhadap objek makam sebelum mengambil foto. Identitas makam saya pastikan melalui plang informasi sejarah yang terdapat di lokasi. Berdasarkan hal tersebut, saya menilai foto makam Raja Ali

bin Raja Ja'far dapat dianggap autentik sebagai dokumentasi visual langsung yang saya ambil sendiri di lokasi.

- Foto Istana Kantor saya ambil sendiri pada 18 Februari 2026, dalam kunjungan yang sama dengan pengambilan foto makam Raja Ali bin Raja Ja'far. Foto diambil secara langsung menggunakan HP pribadi ketika saya berada di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Foto tersebut merupakan file asli dari perangkat saya dan masih tersimpan dalam HP, sehingga sumber dan proses perolehannya dapat diketahui dengan jelas.

Foto Istana Kantor juga tidak mengalami pengeditan, pemotongan, pemberian filter, atau perubahan lainnya. Saya tidak melakukan perubahan terhadap kondisi bangunan sebelum mengambil gambar, sehingga foto menunjukkan keadaan objek sebagaimana yang saya temui ketika berkunjung. Identitas bangunan saya pastikan melalui plang informasi sejarah yang terdapat di lokasi. Oleh karena itu, saya menilai foto tersebut autentik sebagai dokumentasi visual langsung mengenai Istana Kantor pada saat saya melakukan kunjungan.

b. Kritik Internal.

Setelah memeriksa sumber secara eksternal, selanjutnya adalah sumber secara internal. Dalam tahap ini, sejarawan dituntut untuk memutuskan sumber itu dapat diandalkan atau tidak. Menurut Helius Sjamsuddin, kritik internal mencakup dua pertanyaan besar: apa yang ingin dikatakan oleh penulis sumber; dan seberapa kredibel saksi atau penulis sumber.²⁶ Berikut kritik internal pada sumber yang penulis gunakan.

- Surat Raja 'Ali ibn al-Marhum Raja Muda Ja'far dari Riau, bertarikh 1856, kode arsip: BOA I.DH. 368/24377 (1). Surat ini

²⁶ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm. 91.

pada dasarnya merupakan permohonan politik Raja Ali bin Raja Ja'far dari Riau kepada Sultan Abdülmecid agar wilayahnya diakui berada di bawah perlindungan Kesultanan Utsmani. Ia menegaskan kesetiaan dan harapannya untuk mendapatkan legitimasi berupa pengakuan resmi, bendera, dan medali kehormatan sebagai simbol hubungan politik dan keagamaan. Dari segi kredibilitas, surat ini dapat dipercaya karena menggunakan bahasa diplomatik resmi, menunjukkan pengetahuan penulis tentang struktur pemerintahan dan etiket korespondensi kerajaan, serta sesuai dengan konteks sejarah abad ke-19 ketika penguasa-penguasa Melayu berusaha mencari dukungan politik dan religius dari Utsmani.

- Surat utusan Riau kepada Wazir Agung yang menjelaskan misinya, kemungkinan ditulis pada tarikh 1857 dengan kode arsip BOA İ.DH. 368/24377 (2). Surat ini berisi permohonan Emir Riau, Raja Ali bin Raja Ja'far, melalui dua utusannya agar diakui sebagai bagian dari kekuasaan Kesultanan Utsmani. Ia menyatakan kesetiaan religius dan keinginannya berada di bawah perlindungan Sultan sebagai khalifah Islam. Dari sisi kredibilitas, isi surat ditulis dengan gaya diplomatik resmi dan sesuai konteks politik abad ke-19, sehingga dapat dianggap otentik dan mencerminkan niat tulus Riau untuk memperoleh legitimasi dari Utsmani.
- Sumber visual Makam Raja Ali Ja'far. Foto makam Raja Ali Ja'far Dari foto tersebut, terlihat sebuah nisan berbentuk bangunan kayu dengan ukiran yang masih terawat. Pada bagian tengah nisan tercantum nama “Raja Ali bin Raja Ja'far”, tahun 1844–1855, serta keterangan “Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga ke-VIII”. Tulisan pada nisan masih dapat dibaca dengan cukup jelas sehingga memberikan informasi mengenai identitas tokoh dan kedudukannya sebagai Yang Dipertuan

Muda Riau-Lingga VIII. Angka 1844–1855 juga dapat dipahami sebagai periode masa jabatannya, sesuai dengan informasi dari sumber sejarah lainnya.

Secara intern, informasi pada foto dapat dipercaya sebagai sumber visual karena keterangan pada nisan secara langsung mengidentifikasi makam sebagai makam Raja Ali bin Raja Ja'far dan mencantumkan kedudukannya. Kondisi makam yang masih baik dan terawat juga memungkinkan informasi pada nisan diamati dengan jelas. Namun, foto ini terutama memberikan informasi mengenai identitas dan keterangan yang tercantum pada makam, sehingga informasi lebih lanjut mengenai kehidupan serta pemerintahan Raja Ali tetap perlu dikonfirmasi melalui sumber sejarah lainnya.

- Dari hasil pengamatan saya terhadap objek sejarah tersebut, terlihat sebuah bangunan dua lantai yang dikenal sebagai Istana Kantor, dengan ciri arsitektur berupa dua bangunan berbentuk menara di bagian depan dan ornamen khas pada bagian fasadnya. Kondisi bangunan terlihat cukup jelas, meskipun beberapa bagian dinding telah mengalami pelapukan dan perubahan warna. Foto ini memberikan gambaran mengenai bentuk, struktur, serta kondisi fisik Istana Kantor pada saat saya melakukan dokumentasi. Berdasarkan sumber sejarah yang saya gunakan, bangunan ini dibangun pada tahun 1855 oleh Raja Ali bin Raja Ja'far.

Secara intern, saya menilai foto ini dapat dipercaya sebagai sumber visual untuk menunjukkan kondisi dan bentuk fisik Istana Kantor pada saat foto diambil. Detail bangunan terlihat cukup jelas sehingga saya dapat mengamati karakteristik arsitektur dan kondisi pelestariannya. Namun, informasi mengenai tahun pembangunan 1855 dan keterkaitannya dengan Raja Ali bin Raja Ja'far tidak dapat dibuktikan hanya melalui

foto. Oleh karena itu, informasi tersebut diperkuat dengan tulisan pada plang inromasi sejarah yang tertulis di sekitar komplek istana, yang tidak terfoto pada foto tersebut.

3. Interpretasi.

Para sejarawan dalam melakukan penelitian akan dihadapkan pada kenyataan bahwa objek kajiannya berkaitan dengan tindakan manusia yang memiliki kehendak, kepentingan, dan emosi. Oleh karena itu, upaya mendekati kebenaran historis tidak cukup hanya dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta, tetapi juga memerlukan penafsiran yang tetap menjaga integritas dan mutu ilmiah penelitian.²⁷ Pada tahap inilah interpretasi menjadi bagian yang penting dalam penelitian sejarah. Melalui interpretasi, berbagai fakta yang telah diperoleh tidak hanya disusun secara kronologis, tetapi juga dianalisis sehingga menghasilkan penjelasan historis yang lebih utuh. Dengan demikian, penelitian sejarah tidak berhenti pada penyajian fakta semata, melainkan melahirkan sejarah yang bersifat analitis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kegiatan analisis tersebut erat kaitannya dengan tahap interpretasi melalui penggunaan suatu pendekatan (*approach*). Cara sejarawan menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa masa lalu sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan. Melalui interpretasi, suatu peristiwa dapat dipahami berdasarkan sudut pandang yang jelas, seperti aspek apa yang menjadi perhatian utama, unsur mana yang dipandang paling penting, serta bagaimana hubungan antarfakta dijelaskan. Dengan kata lain, interpretasi menjadi "kacamata" yang membantu sejarawan memahami dan menjelaskan realitas masa lampau. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi untuk menepong aspek-aspek sosial yang melatarbelakangi terjadinya hubungan diplomatik antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani, serta dinamika sosial yang menyertainya.²⁸

Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa pendekatan sosiologi memungkinkan sejarah dipahami melalui dinamika sosial yang melatarbelakangi

²⁷ Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012.), hlm. 25.

²⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 4.

suatu peristiwa. Dinamika tersebut mencakup berbagai aspek, seperti struktur sosial, sistem politik, jaringan interaksi, struktur organisasi, serta hubungan antarkelompok dalam masyarakat.²⁹ Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, seorang sejarawan dapat lebih cermat melihat berbagai persoalan yang melingkupi suatu peristiwa sejarah, sehingga mampu memotret fenomena sejarah dari berbagai sudut pandang yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi terutama digunakan untuk memahami dua konteks besar, yaitu aspek politik dan aspek sosial-budaya yang melatarbelakangi hubungan antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani.

Hubungan antara Kesultanan Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke-19 tidak dapat dilepaskan dari semakin kuatnya dominasi kolonial Belanda di kawasan ini. Pada masa tersebut, banyak kerajaan Islam berupaya mempertahankan eksistensi politiknya di tengah ruang gerak yang semakin dibatasi oleh pemerintah kolonial. Dalam konteks inilah hubungan Riau-Lingga dengan Kesultanan Utsmani dapat dipahami. Hubungan tersebut diduga dilandasi oleh kepentingan politik yang berakar pada identitas dan solidaritas keagamaan. Sebagaimana ditunjukkan pada hubungan awal yang dibangun Raja Ali Ja'far, Riau-Lingga, seperti halnya sejumlah kerajaan Islam lainnya di Nusantara, berusaha memperoleh pengakuan politik dan legitimasi dari otoritas Islam yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Hubungan tersebut dapat dipahami melalui konsep patron-klien (*patron-client*), yang oleh James C. Scott dipandang sebagai salah satu bentuk relasi struktural yang penting dalam politik Asia Tenggara. Dalam praktiknya, hubungan patron-klien bersifat timbal balik, tetapi tidak berada pada posisi yang setara. Pihak yang memiliki kedudukan politik lebih rendah berupaya memperoleh perlindungan, legitimasi, atau pengakuan dari kekuatan yang memiliki otoritas lebih besar, sementara pihak patron memperoleh loyalitas dan dukungan simbolik dari kliennya.³⁰ Pola hubungan seperti ini tampak dalam relasi antara Kesultanan Utsmani dan sejumlah kerajaan Melayu-Islam di Asia Tenggara. Di tengah

²⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 144.

³⁰ J. C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Chance in Southeast Asia," *American Political Science Review* 66, no. 1 (1958), hlm. 91-113.

semakin kuatnya dominasi kolonial Eropa, kerajaan-kerajaan tersebut berusaha mempertahankan eksistensi politik mereka dengan membangun hubungan kepada Utsmani sebagai otoritas politik dan keagamaan tertinggi dalam dunia Islam.

Selain dalam ranah politik, hubungan dengan Kesultanan Utsmani juga terus hidup melalui berbagai dimensi yang bersifat non-formal. John Arnold berpendapat bahwa manusia pada masa lampau memiliki cara berpikir (*mentality*) yang berbeda dengan manusia masa kini. Perbedaan tersebut mencakup cara mereka memandang dunia, membangun ideologi, mengembangkan imajinasi, serta membentuk berbagai gerakan sosial dan keagamaan.³¹ Oleh karena itu, untuk memahami masyarakat masa lalu, sejarawan tidak cukup hanya berfokus pada hubungan-hubungan politik yang bersifat formal, tetapi juga perlu menelusuri berbagai bukti sejarah yang pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai tindakan politik oleh para pelakunya. Dalam konteks penelitian ini, perjalanan haji, jaringan keilmuan, dan perkembangan tarekat yang berpusat di Mekkah menjadi salah satu landasan penting untuk melihat bahwa hubungan antara Kesultanan Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak hanya berlangsung melalui jalur diplomatik, tetapi juga terus hidup melalui hubungan sosial, intelektual, dan keagamaan yang bersifat non-formal.

Salah satu contohnya tampak pada kedudukan masyarakat Muslim Asia Tenggara yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai *bilād al-Jāwa* atau "negeri-negeri Jawi". Komunitas ini dipandang sebagai bagian dari peradaban Islam yang lebih luas bukan semata-mata karena adanya hubungan politik formal dengan pusat-pusat kekuasaan Islam, melainkan juga karena terbangunnya berbagai jaringan sosial dan budaya yang menghubungkan mereka dengan dunia Islam. Hubungan tersebut berkembang melalui pelaksanaan ibadah haji, tradisi menuntut ilmu, jaringan ulama, tarekat, serta praktik-praktik budaya dan spiritual Islam yang menghubungkan komunitas Muslim di Nusantara dengan Mekkah dan pusat-pusat keilmuan Islam lainnya.³² Dengan demikian, keterhubungan antara masyarakat *bilād al-Jāwa* dan dunia Islam dapat dipahami sebagai hasil dari

³¹ John Arnold, *Sejarah: Sebuah Pengantar Singkat* (Yogyakarta: BASABASI, 2021), 142-143.

³² Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds* (London & New York: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 11-18.

interaksi sosial-budaya yang terus berlangsung, bahkan ketika tidak diwujudkan dalam bentuk hubungan politik yang formal.

Melalui kerangka hubungan sosial-budaya yang bersifat non-formal dan hubungan politik yang bersifat formal tersebut, dapat ditarik satu benang merah yang menghubungkan keduanya, yaitu Islam. Islam tidak hanya bergerak dalam ranah spiritual dan ritual, tetapi juga membentuk suatu komunitas yang memiliki cara pandang, kepentingan, serta tujuan-tujuan politik bersama. Dalam pengertian ini, Islam menjadi kekuatan sosial yang mampu membangun kesadaran kolektif, struktur hubungan, dan potensi gerakan bersama di tengah masyarakat Muslim.³³ Kesadaran tersebut secara perlahan melahirkan apa yang oleh Benedict Anderson disebut sebagai *imagined communities* (*komunitas terbayang*), yaitu keadaan ketika seseorang merasa menjadi bagian dari suatu komunitas yang lebih luas meskipun tidak pernah bertemu secara langsung dengan sebagian besar anggotanya.³⁴ Pada abad ke-19, Islam menjadi perekat yang membangun imajinasi kebersamaan di antara komunitas Muslim dari berbagai wilayah. Kesamaan keyakinan, pengalaman, jaringan keilmuan, dan ikatan terhadap pusat-pusat Islam seperti Mekkah dan Kesultanan Utsmani menumbuhkan rasa memiliki terhadap dunia Islam yang lebih luas. Dalam konteks ekspansi kolonial Eropa, kesadaran tersebut mendorong sebagian kerajaan Islam di Nusantara, termasuk Riau-Lingga, untuk menjalin hubungan dengan Kesultanan Utsmani sebagai simbol otoritas politik dan persatuan umat Islam.

4. Historiografi.

Dalam menelaah hubungan antara Turki-Utsmani dan Kesultanan Riau-Lingga, maka dalam penulisannya kita akan menapaki jejak-jejak pengaruh hubungan tersebut. Mulai dari hubungan awal hingga hubungan yang tersisa menjelang runtuhnya Kesultanan Riau-Lingga. Penyajiannya tidak terlepas pada sebab-akibat, kecenderungan, dan interaksinya.

³³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 33.

³⁴ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: INSIST, 2008), hlm. 8-11.

Pada Bab I pendahuluan ini penulis menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Bab ini menjadi pegangan bagi penulis untuk menyajikan narasi sejarah di bagian selanjutnya.

Bab II, Islam dan Kedatangan Bangsa Barat: Dinamika Politik Kepulauan Indonesia-Melayu Serta Akar Hubungan Dengan Daulah Utsmani. Pada bagian ini, penulis akan menelusuri hubungan awal antara Turki-Utsmani dan Dunia Melayu yang diwakili oleh Kerajaan Aceh pada abad ke-16. Tak lupa konteks sejarah yang menjadi alasan hubungan tersebut. Serta visi politik yang membersamai hubungan tersebut.

Bab III, Diantara Dua Hegemoni: Kolonialisme Belanda (1782-1830) dan Hubungan Diplomatik Antara Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani (1856-1858). Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan dinamika politik Kerajaan Riau-Lingga dengan Belanda serta campur tangan Belanda atas kedaulatan Riau-Lingga sebagai entitas politik lokal. Lalu akan ditelusuri hubungan yang terlihat antara Riau-Lingga dengan Kesultanan Utsmani, dimana terlihat lewat jaringan keilmuan islam dan jaringan tarekat. Yang akhirnya terjalin hubungan awal antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Daulah Utsmani.

Bab IV, dalam bab ini berisi hasil sekaligus kesimpulan mengenai penelitian *Antara Dunia Melayu dan Turki-Utsmani: Jejak Hubungan Diplomatik Antara Kerajaan Riau-Lingga dan Kesultanan Utsmani (1856-1858)*.